

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSPARANSI
ANGGARAN DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH DIMODERASI BUDAYA ORGANISASI
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH**

*The Effect of Regional Original Revenue, Budget Transparency and Internal
Control System on Regional Financial Performance Moderated by
Organizational Culture in Banggai Laut Regency, Central Sulawesi Province*

MUHAMMAD ALI HAMID

A042221004



PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TESIS

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSPARANSI
ANGGARAN DAN SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH DIMODERASI BUDAYA ORGANISASI
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Sebagai persyaratan memperoleh gelar MAGISTER Keuangan Daerah

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ALI HAMID

A042221004



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSPARANSI ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DIMODERASI BUDAYA ORGANISASI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROPINSI SULAWESI TENGAH

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALI HAMID
A042221004

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 02 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196406091992031003

Anggota

Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ali Hamid
NIM : A042221004
Jurusan/Program Studi : Magister Keuangan Daerah
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSPARANSI ANGGARAN DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
DIMODERASI BUDAYA ORGANISASI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ali Hamid

PRAKATA



Segala puji bagi dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSPARANSI ANGGARAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DIMODERASI BUDAYA ORGANISASI DI KABUPATEN BANGGAI LAUT PROPINSI SULAWESI TENGAH”**. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelas Magister Keuangan Daerah pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Darmawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/Ibu di kantor pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut membantu dan memberi waktunya kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bupati Banggai Laut yang telah memberi kemudahan dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih kepada Ibu Saya Salmin dan Istri Ici Amok, S.Ikom. beserta saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat peneliti atas bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini

Makassar, Agustus 2024

Muhammad Ali Hamid

ABSTRAK

MUHAMMAD ALI HAMID. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi Budaya Organisasi di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah* (dibimbing oleh Arifuddin dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan mengukur pengaruh Pendapatan Asli Daerah, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi oleh budaya organisasi di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dan regresi moderasi. Objek penelitian adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banggai Laut. Penentuan sampel menggunakan *stratified random sampling* dengan jumlah sampel pada penelitian ini tiga puluh Aparatur Sipil Negara. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah, transparansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan (2) Budaya organisasi tidak berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, transparansi, sistem pengendalian internal, kinerja keuangan daerah, budaya organisasi



ABSTRACT

MUHAMMAD ALI HAMID. *The Effect of Regional Original Revenue, Transparency and Internal Control Systems on Regional Financial Performance Moderated by Organizational Culture in Banggai Laut Regency, Central Sulawesi Province* (supervised by Arifuddin and Darmawati)

The research aims at examining and measuring the effect of the Regional Original Revenue, Transparency and Internal Control Systems on the Regional Financial Performance moderated by the Organizational Culture in Banggai Laut Regency. The research used qualitative method and data were analysed using the techniques of the multiple linear regression and moderated regression analyses. The research objects were the entire State Civil Apparatus in Banggai Laut Regency. The samples were determined using the stratified random sampling technique. The number of samples in the research was 30 State Civil Servants. The data were collected using the questionnaire. The research results indicate that: (1) the Regional Original Revenue, Transparency and Internal Control Systems have the positive and significant effect on Regional Financial Performance, (2) the Organizational Culture has no effect on the Regional Original Revenue, Transparency and Internal Control Systems on the Regional Financial Performance.

Key words: Regional Original Income, Transparency, Internal Control System, Regional Financial Performance and Organizational Culture



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KE ASLIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Teoritis	12
2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah	12
2.1.2. Teori Keagenan	12
2.1.3. Teori Stewardship.....	16
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.1.5. Transparansi Anggaran	20
2.1.6. Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.1.7. Budaya Organisasi	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	28
3.1.Kerangka Konseptual	28
3.2. Hipotesisi	30
BAB IV METODE PENELITIAN	35
4.1. Rancangan Penelitian.....	35
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
4.3. Populasi dan Sampel	35
4.4. Jenis dan Sumber Data.....	36
4.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
4.6. Variabel dan Defenisi Operasional.....	37
4.7. Metode Analisa Data.....	40
BAB V HASIL PENELITIAN.....	46
5.1. Analisis Hasil Penelitian.....	46
5.1.1. Gambaran Umum Responden.....	46
5.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	48
5.1.3. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas.....	55
5.1.4. Uji Asumsi Klasik.....	58
5.1.5. Pengujian Hipotesis.....	61
BAB VI PEMBAHASAN.....	67
6.1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.....	68
6.2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.....	70
6.3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.....	70
6.4. Budaya Organisasi dapat memoderasi Pendapatan Asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.....	71
6.5. Budaya Organisasi dapat memoderasi transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.....	72

6.6. Budaya Organisasi dapat memoderasi transparansi terhadap kinerja keuangan daerah.....	73
BAB VII PENUTUP.....	75
7.1. Kesimpulan.....	75
7.2. Implikasi.....	76
7.3. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Realisasi pendapatan pemerintah kabuapten banggai Laut.....	1
2.1. Penelitian Terdahulu	8
5.1. Sebaran responden menurut jenis kelamin	48
5.2. Sebaran responden menurut kerja	47
5.3. Sebaran responden jenjang pendidikan	48
5.4. Variabel Kinerja keuangan daerah	49
5.5. Variabel Pendapatan Asli daerah	50
5.6. Variabel Transparansi	52
5.7. Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	53
5.8. Variabel Budaya Organisasi	54
5.9. Validitas.....	56
5.10. Reabilitas	57
5.11. Multikolineritas	59
5.12. Hasil Uji Koefisien determinasi.....	61
5.13. Hasil Uji F.....	61
5.14. Hasil Uji T.....	62
5.15. Hasil Uji Determinasi.....	64
5.16. Hasil Uji T	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Grafik PAD	3
1.2. Kerangka Pemikiran	30
5.1. Uji heterokedastistast	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian.....	84
2. Validitas dan Reabilitas	90
3. Uji Asumsi Klasik	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi paska reformasi sampai saat ini mengalami pasang surut di tandai beberapa kali perubahan aturan tentang Pemerintah Daerah hal ini untuk mengatasi berbagai problem yang timbul akibat dari kebijakan desentralisasi. Utamanya hubungan keuangan pusat dan daerah, yang terakhir revisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah pusat dan Daerah. Tujuan utamanya adalah menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien,

Meskipun upaya perubahan regulasi tentang pemerintah daerah terus dilakukan hal ini belum berdampak signifikan pada pengelolaan keuangan daerah karena masih banyak daerah belum mampu mandiri secara fiskal masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Berdasarkan data Kompas (2020) dari 542 daerah hanya 1 daerah yaitu Kabupaten Badung yang mencapai level sangat mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil memiliki kontribusi terhadap pembangunan di daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat tercermin dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dimiliki setiap daerah yang dilaporkan secara berkala. Laporan keuangan tersebut memberikan informasi kinerja keuangan dan posisi keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan

daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Kinerja keuangan daerah menurut Roland dan Sarmiyatningsi dalam Nasution (2018) kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Sehingga kinerja keuangan daerah mempunyai ukuran dasar untuk menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Maka dari itu kinerja keuangan daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu tantangan bagi daerah seiring dengan terbukanya informasi dan kepedulian Masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum mampu mengelola keuangannya dengan baik. Artinya kinerja keuangan pemerintah daerah selama ini masi dalam kategori kurang baik. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami kinerja keuangan yang kurang baik adalah Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten yang baru saja seumur jagung ini mengalami masalah kinerja keuangan dan tingkat pendapatan asli daerah yang rendah.

Berdasarkan data dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Banggai laut 2019-2022 sebagai berikut

Tabel. 1.1. Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Banggai Laut

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan LRA	645.358.670.818	654.951.876.141	621.163.342.477	664.691.569.465,00
Pendapatan Transfer	609.214.466.508	628.077.050.866	528.657.385.733	568.689.704.407.00
Pendapatan PAD	25.956.484.310	26.874.825.275	22.179.522.152	27.764.905.828.34

Sumber, diolah oleh Penulis (2024)

Grafik 1.1. Pendapatan Daerah



Sumber, Data diolah 2024

Diatas tampak pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar dibanding pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah. Ini berarti Kabupaten Banggai Laut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

Di Tahun 2019 Rasio kemandirian daerah 4,09 persen, Tahun 2020 Rasio kemandirian Daerah 4,10 persen dan Rasio kemandirian di tahun 2021 adalah 4,03 persen. Sementara di Tahun 2022 Rasio kemandirian daerah 4,65 Persen. Ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Banggai Laut masih sangat rendah karena hanya 5 persen. Rasio ini menunjukkan bahwa PAD hanya

menyumbang kurang dari 5 persen dari total pendapatan daerah, menandakan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membatasi fleksibilitas fiskal daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dibutuhkan kajian strategis dan kebijakan kinerja keuangan untuk menaikkan rasio kemandirian daerah.

Menurut Halim (2017) rasio kemandirian dari 0 – 25 persen di kategorikan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian begitupula sebaliknya.

Peningkatan PAD dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah sesuai dengan penelitian Putri (2015) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan daerah karena semakin besar PAD yang di terima dalam satu tahun dapat membantu untuk kebutuhan belanja daerah. Daerah yang mampu meningkatkan PAD-nya secara berkelanjutan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana PAD mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan PAD. Namun berbeda yang di temukan oleh Azhar (2021) PAD tidak berpengaruh pada kinerja keuangan daerah Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan/BPHTB. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu

daerah tidak dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Selain PAD Output dari Kinerja keuangan juga di pengaruh berbagai aspek salah satunya adalah transparansi sebagaimana penelitian oleh Eit Novianti (2019), Transparansi berjalan dengan baik maka, akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian lain memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lourence (2015) dan Saputra dkk (2014), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sementara hasil penelitian yang berbeda oleh Nasution (2018) yang menyebutkan transparansi tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah, tranparansi akan berpengaruh jika aturan transparansi di berlakukan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan apa yang terjadi dimana buruknya transparansi keuangan daerah kabupaten Banggai Laut di tandai dengan tidak adanya akses publik terhadap dokumen penggunaan anggaran APBD di website pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Ini bisa dilihat secara langsung pada situs website www.ppid.banggailautkab.go.id tidak ada satupun dokumen anggaran daerah yang bisa di akses. Padahal dalam Laporan BPK telah menjadi penegasan (Hal. 39) jelas disebutkan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banggai Laut

Dampak buruk dari hasil kinerja yang kurang di Kabupaten Banggai Laut tercermin dari hasil evaluasi BPK terhadap laporan keuangan kabupaten Banggai laut menyebutkan Kurangnya tingkat pemahaman akan pentingnya pelaporan keuangan serta pelaporan barang milik daerah yang menyebabkan pelaporan barang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu” (LHP BPK, 41;2022)

Temuan tersebut mengindikasikan adanya sistem pengendalian yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan pelaporan aset negara tidak di laksanakan tepat waktu. Sementara sistem pengendalian berdasarkan Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fakta diatas sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2019) BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Dampak dari sistem pengendalian yang lemah berimplikasi pada tata kelola pemerintahan atau good governance sehingga rawan terhadap tindakan koruptif, (Salindeho, 2013). Sistem pengendalian internal yang lemah dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku korupsi yang mengorogoti kinerja keuangan daerah. Dihat dari bukti emperis Kabupaten Banggai Laut masuk dalam

kategori daerah rawan korupsi dilihat dari 10 Tahun terakhir kasus korupsi APBD makin marak dengan banyaknya aparat yang di vonis atas kejahatan korupsi di pengadilan, kasus terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut di putus bersalah oleh pengadilan karena terbukti korupsi dana APBD.

Salah satu faktor utama lambatnya kinerja keuangan daerah seperti pada laporan BPK diatas yang secara konsisten sejak 2019-2022 menyebutkan bahwa kendala realisasi belanja dan pendapatan daerah adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Priagung (2016), menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Olehnya itu pemilihan variabel moderasi yaitu budaya organisasi dengan pertimbangan bahwa capaian kinerja visi dan misi berpengaruh juga pada budaya organisasi yaitu sistem nilai yang tumbuh pada organisasi atau lembaga pemerintah.

Olehnya itu berdasarkan pemaparan dan fenomena diatas dimana masih terdapat hasil penelitian sebelumnya yang berbeda saya tertarik untuk meneliti kinerja keuangan daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya maka, judul dalam penelitian ini adalah **"Pengaruh Pendapatan Asli daerah Transparansi Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Terhadap kinerja keuangan daerah dimoderasi Budaya di Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas rumusan masalah yang di ajukan pada penelitian adalah

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut?
- 2) Apakah Transparansi Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut?
- 3) Apakah Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Banggai Laut ?
- 4) Apakah Budaya dapat memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut?
- 5) Apakah budaya dapat memoderasi hubungan Transpransi dengan kinerja keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut?
- 6) Apakah Budaya dapat memoderasi hubungan Sistim pengendalian internal dengan kinerja keuangan Daerah Kabupaten Banggai Laut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja keuangan Daerah selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memperlihatkan naik turunnya PAD akan sangat berpengaruh pada kinerja keuagan daerah.
2. Menganalisis Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah untuk mengidentifikasi apakah tingkat transparansi dalam pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi memengaruhi pertanggungjawaban dan kinerja organisasi.

3. Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan tujuan apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kontrol internal dapat meningkatkan atau menghambat pencapaian tujuan organisasi.
4. Mengidentifikasi Moderasi Budaya Organisasi terhadap Hubungan PAD pada Kinerja Keuangan Daerah tujuannya sebagai variabel moderasi apakah memperkuat atau melemahkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, dengan Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengaruh Budaya Organisasi dalam konteks pengelolaan keuangan Daerah.
5. Mengidentifikasi Moderasi Budaya Organisasi terhadap hubungan Transparansi Anggaran pada kinerja keuangan daerah apakah Budaya Organisasi memiliki peran sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara Transparansi, Anggaran dengan Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengaruh Budaya dalam konteks pengelolaan keuangan Daerah.
6. Mengidentifikasi Moderasi Budaya Organisasi terhadap Hubungan SPI pada Kinerja keuangan daerah tujuannya apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antaradnan Sistem Pengendalian Internal dengan Kinerja Keuangan Daerah. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengaruh Budaya dalam konteks pengelolaan keuangan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Kontribusi Akademis: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademis terkait Kinerja Keuangan Daerah, khusus dalam memahami faktor-faktor determinan yang mempengaruhi dan peran budaya Organisasi sebagai faktor moderasi.
- 2) Kontribusi terhadap Teori: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan Daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- 3) Pedoman bagi Pengambilan keputusan Manajerial: Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pimpinan daerah dalam mengembangkan kebijakan dan strategi terkait Pendapatan Asli Daerah, Transparansi, dan pengendalian internal untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.
- 4) Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Transparansi: Dengan menunjukkan hubungan antara transparansi dan Kinerja Keuangan Daerah, penelitian ini dapat mendorong organisasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi informasi kepada pemangku kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keandalan organisasi di mata publik.
- 5) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Internal: Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam mencapai kinerja keuangan yang optimal. Hal ini

dapat membantu organisasi dalam meningkatkan sistem pengendalian internal mereka untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja.

- 6) Rekomendasi Kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 7) Peningkatan PAD, Transparansi, Sistem pengendalian internal dan Kinerja Keuangan Daerah: Dengan adanya penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, diharapkan akan meningkatkan pula PAD, transparansi dan Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah.
- 8) Pengembangan Metode Penelitian: Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penelitian terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Daerah dan peran Budaya Organisasi sebagai faktor moderasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka kinerja yang dilakukan dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Sedangkan, kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Andriyani (2020)

Menurut Halim (2016), kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, Sementara Mardiasmo (2016), berpendapat kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah, Aspek Kedua, disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Sementara Tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sumarjo dalam Nurul (2018), Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara hal yang sama di ungkapkan Sumarjo (2010) sebagaimana di kutip Siregar (2020) berdasarkan hasil penelitiannya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah "keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat". Bentuk kinerja tersebut seperti rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

2.1.2. Teori Keagenan

Agensi teori merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal Shoimah dkk, (2021). Teori ini dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan (agency theory) ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Pihak manajemen adalah tenaga profesional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan manajemen perusahaan agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Anggraeni (2011), Sedangkan pihak principal adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) yang menginginkan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang sudah dikeluarkannya dan akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen

diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham, Hestanto (2020).

Kontrak dapat bersumber dari kebiasaan (Adnan, Chatterjee & Nankervis, 2003), kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama (Shleifer & Vishny, 1986), dan ikatan hukum formal (Biondi, Canziani & Kirat, 2007). Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap partisipan. Walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

Mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 sebagai rujukan kontrak formal, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. aturan tersebut menyatakan bahwa Bupati dan Walikota bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program pemerintah. Selanjutnya, dinyatakan bahwa Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat. Mekanisme pemilihan ini merupakan pertanda adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan walikota. Fakta adanya pemberian otoritas eksekutif dan pelimpahan wewenang kepada bupati dan walikota menunjukkan bahwa bupati dan

walikota berperan sebagai agen dan rakyat merupakan prinsipal dalam rerangka hubungan keagenan.

Sutaryo (2012), DPRD dalam UU tersebut berperan sebagai mitra kerja Bupati dan Walikota yang berperan dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Selanjutnya, dinyatakan bahwa anggota DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung. Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam struktur pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Konstelasi berdasarkan peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa DPRD mempunyai karakteristik representatif yang bertugas melakukan monitoring. Oleh karena itu, DPRD dapat dianggap setara dengan board dalam governance berdasarkan konsep keagenan.

2.1.3. Teori Stewardship

Daniel Stepanus (2018), Teori *Stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para *stakeholder*

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha

mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Eko Raharjo (2012), Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup

Menurut Podrug (2011), beberapa pertimbangan penggunaan teori *stewardship*. Teori *stewardship* memandang bahwa pemerintah sebagai *stewards*, akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat. Teori *stewards* menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai *stewards* dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principals* dan organisasi. Model of man pada teori *stewardship* didasarkan pada *steward* yang memiliki tindakan kolektif atau berkelompok, bekerjasama dengan utilitas tinggi dan selalu bersedia untuk melayani.

2.1.4. Pendapatan Asli daerah

Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan pada UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Widjaya (2003). Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha suatu daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan sendiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah wilayahnya. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Aji (2018)

Sementara jenis-jenis pendapatan Asli daerah sebagaimana di jelaskan oleh Badrudin (2013) yang dikutip langsung Srinadi (2023) menyebutkan

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada daerah yang terutang pajak daerah baik oleh orang pribadi maupun badan yang mana sifatnya memaksa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga imbalannya tidak akan didapatkan secara langsung serta pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur tersendiri lebih lanjut dalam UU No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan jenis pungutan selain pajak sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah diatur tersendiri lebih lanjut dalam UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan susunan kegiatan serta tindakan yang meliputi perencanaan, pengendalian, penentuan kebutuhan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga perubahan status hukum serta penatausahannya. Hasil dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ini misalnya seperti bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

4. PAD Lain-Lain yang sah

Berdasarkan pada Pasal 31 ayat (4), beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah lain yang juga sah antara lain yaitu hasil penjualan kekayaan atau Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan atau barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil dari kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda atas pelaksanaan keterlambatan pekerjaan, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari

pengembalian, pendapatan dari BLUD, penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, hingga penerimaan komisi maupun potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh daerah, serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.2.4.5. Transparansi Anggaran

Transparansi Anggaran adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Katz dalam Wicaksono (2017), menyatakan bahwa transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan.

Suryani dalam Maani (2009), Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan

(3) sistem dan kapasitas dibalikproduksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu.

Hasil penelitian Nasution (2018) menyebutkan Hasil hipotesis untuk variabel Transparansi yaitu Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan artinya apabila Transparansi sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Artinya Transparansi harus didukung oleh penerapan aturan tanpa penegakan aturan maka Transparansi tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.6. Sistem Pengendalian Internal

Fayol dalam Ompusunggu (2020), berpendapat bahwa pengendalian adalah usaha memeriksa apakah semua kegiatan terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Pengendalian di butuhkan organisasi unntuk dapat memastikan tujuan yang telah ditetapkan benar-banar telah dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya tanpa pengendalian tujuan organisasi akan kacau.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 1 ayat 1 menyebutkan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara Mulyadi dalam Mokoginta dkk (2017), pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan

komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Lingkup sistem pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas (1) Pengendalian Lingkungan (2) Penilaian Resiko (3) Kegiatan Pengendalian (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan Pengendalian Internal

2.1.6. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang baik pula. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan Priagung (2016), menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi. Sari (2023) menyebutkan Budaya Organisasi secara parsial tidak meningkatkan kinerja namun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Olehnya itu Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan, sebaliknya yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan yang budaya organisasi kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam, dianut, dan diperjuangkan oleh sebagian besar anggota organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan, Sutrisno (2010)

Sutrisno (2010), menyatakan Budaya Organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai (Values). Keyakinan-keyakinan (beliefs),

asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya.

Menurut Tunstall dalam Sutrisno (2010) budaya organisasi sebuah konstalasi umum daripada keyakinan-keyakinan, adat istiadat, keiasaan-kebiasaan, sistem-sistem nilai, norma-norma perilaku dan cara-cara melakukan bisnis yang unik bagi masing-masing perusahaan yang menetapkan pola-pola perilaku dan emosi-emosi yang implisit dan yang akan muncul menandai kehidupan dalam organisasi

Sementara dilihat dari fungsinya Sutrisno (2010) menyebutkan ada empat fungsi budaya organisasi

1. Budaya mempunyai peran pembeda. Hal itu berarti budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain
2. Budaya organisasi membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi
3. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu
4. Budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial

Budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai dan norma dan perilaku yang tumbuh dalam kehidupan berorganisasi.

21. Penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rina Nurafifa (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan keuangan Pemerintah daerah Kab. Merangi	Dengan menggunakan metode penelitian survey exsplanatory, sistem pengendalian internal, budaya organisasi Berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
2	Sri Rahayu dkk (2022)	Pengaruh Kejelasan anggaran, sistem pengendalian intern, dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan	Metode penelitian deksriptif verifikatif, populasinya organisasi perangkat Daerah (OPD) dengan 42 reponden. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Daerah sementara, pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
3	Rusdi Abdul Karin dan Mursalim (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan sistem pengendalian terhadap kinerja keuangan	Metode penarikan sampel dengan menggunakan metode sensus. Seluruh instrumen diukur menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel tranparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sementara, sistem pengendalian internal

			secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan
4.	Ihsan Wahyudin dan Hastuti, 2020	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa variabel Pendapatan Asli daerah positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan.
5	Ni Made Ria Satyawati dan I Wayan Suartana	Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja yang berdampak pada kinerja keuangan	Hasil dari penelitian budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada lembaga pengkreditan desa. Selain itu budaya organisasi dari dukungan manajemen belum mampu meningkatkan kinerja organisasi karena keterbatasan sumber daya manusia
6	Ade Risna Sari dkk	Dampak Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Karyawan, Budaya Organisasi, dan Kinerja Keuangan di PT. XYZ	Hasil penelitian menyebutkan Budaya organisasi ditemukan cukup sehat, dengan rasa kerja sama dan kolaborasi yang kuat. Namun, ada juga beberapa contoh persaingan dan perang antar departemen, yang menunjukkan bahwa mungkin ada ruang untuk perbaikan di bidang ini. Manajemen menyatakan

			komitmennya untuk mengembangkan budaya yang mendukung dan inklusif, yang menunjukkan bahwa organisasi menyadari pentingnya faktor ini dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.
7	Amerta Felina Kusuma (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem pengendalian internal terhadap kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian dari variabel Transparansi dan Sistem pengendalian internal dan kejelasan anggaran terhadap kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan.
8	Khoirul Aswar	Financial Performance of Local Governments in Indonesia	Pendapatan daerah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu komponen yang dapat menciptakan kekayaan daerah dan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dapat menjadi gambaran pelaksanaan program di pemerintah daerah dimana pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara efisien.
9	Iqlima Azhar (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan	Tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula

		Pemerintah kota Langsa	tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB.
--	--	---------------------------	---